



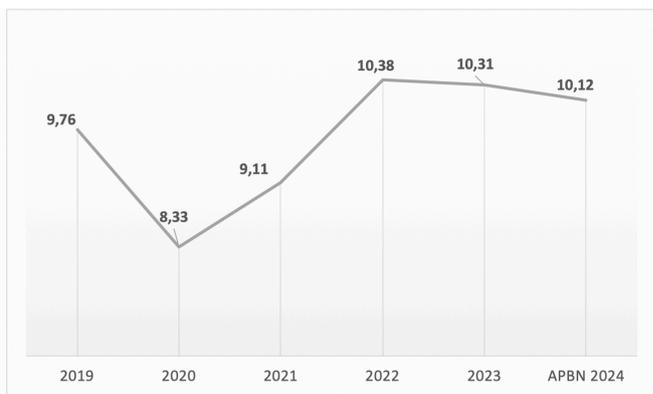
Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENURUNAN TARGET RASIO PERPAJAKAN DALAM RAPBN 2025

**Eka Budiyantri**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[eka.budiyantri@dpr.go.id](mailto:eka.budiyantri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah menetapkan target rasio perpajakan atau *tax ratio* sebesar 10,09-10,29% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dari pencapaian rasio perpajakan Indonesia pada tahun 2023 sebesar 10,31% dari PDB. Target batas bawah yang ditetapkan sebesar 10,09% dari PDB itu juga lebih rendah dari target rasio perpajakan tahun 2024 sebesar 10,12% dari PDB (Gambar 1). Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, rasio perpajakan Indonesia tercatat masih berada di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%).



Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Gambar 1. Rasio Perpajakan Indonesia  
Tahun 2019-2024 (dalam %)

Keputusan untuk menurunkan target rasio perpajakan ini diambil karena terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja penerimaan pajak. *Pertama*, adanya tren pergeseran konsumsi berbasis digital dan praktik perdagangan digital yang semakin masif. Walaupun ekonomi digital berdampak positif pada efisiensi perekonomian, namun sistem perpajakan saat ini belum mampu menangkap dan memanfaatkan sepenuhnya aktivitas ekonomi tersebut.

Hal itu memunculkan risiko kehilangan basis pajak (*tax base*) khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari para pelaku ekonomi digital. *Kedua*, fluktuasi harga dan permintaan atas komoditas menambah risiko terhadap penerimaan pajak. Apalagi, perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas global. Harga komoditas tahun 2023 tidak sebaik tahun 2022 sehingga penerimaan pajak tahun 2023 tidak sebaik tahun 2022. Tren ini diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2025.

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, asumsi pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 cukup optimis di kisaran 5,1-5,5% dan defisit fiskal juga meningkat dari 2,29% dari PDB (2024) menjadi 2,45-2,82% dari PDB pada tahun 2025. Namun, rasio perpajakan yang terlalu moderat itu cukup mengkhawatirkan karena pada saat yang bersamaan, belanja pemerintah di RAPBN 2025 juga ditargetkan meningkat cukup signifikan sebesar 14,59-15,18% dari PDB. Kondisi di mana rasio pajak menurun sementara belanja meningkat, tentu dapat memengaruhi arah kesinambungan fiskal. Di sisi lain, peneliti pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai bahwa target rasio perpajakan yang rendah sebenarnya realistis dan rasional sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Namun, target pajak yang rendah perlu disesuaikan dengan kebijakan belanja yang jauh lebih selektif dan berdasarkan prioritas. Hal ini dimaksudkan agar defisit tetap berada di batas aman dan utang tidak terlalu membengkak.

Penurunan rasio perpajakan ini juga menjadi pertanda bahwa Indonesia belum bisa menaikkan peringkat utang di tingkat global. Saat ini, peringkat utang yang disematkan beberapa lembaga pemeringkat internasional untuk Indonesia masih berada di level BBB atau layak investasi (*investment grade*) dengan *outlook* stabil. Artinya, tingkat beban utang pemerintah dinilai rendah dan pertumbuhan ekonomi cukup baik. Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan rasio perpajakan pada kisaran 13% dari PDB agar peringkat utang Indonesia meningkat menjadi Single A.

## Atensi DPR

Target rasio perpajakan pada RAPBN 2025 ditetapkan sebesar 10,09-10,29% dari PDB. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 10,31% dari PDB. Penurunan ini menunjukkan target penerimaan perpajakan menurun sehingga kapasitas fiskal juga ikut menurun. Padahal di sisi lain, target belanja pemerintah meningkat cukup signifikan sebesar 14,59-15,18% dari PDB.

Dalam hal ini, DPR RI khususnya Komisi XI perlu mengingatkan pemerintah agar meningkatkan efektivitas belanjanya dengan melakukan *refocusing* anggaran pada hal-hal yang sifatnya dapat meningkatkan produktivitas. Artinya, pemerintah harus lebih selektif dan bijak dalam menggunakan anggaran. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga tetap harus dilakukan oleh Komisi XI DPR RI secara intensif. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyusun strategi meningkatkan penerimaan pajak, misalnya melalui perluasan *tax base*, serta mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

## Sumber

bisnis.com, 10 Juni 2024;  
*Kompas*, 11 dan 12 Juni 2024;  
*Kontan*, 10 Juni 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024